

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Muis Yusuf dan Mohammad Taufik Makarao, 2011, *Hukum Kehutanan di Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Amiruddin, & Zainul Asikin, (Cetakan ke-6, 2012), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, UNPAM PRESS, Tangerang Selatan.
- Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Riawan Tjandra, 2019, *Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Salim, 2002, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, PT Sinar Grafika, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI PRESS, Jakarta.
- Supriadi, 2011, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, PT Sinar Grafika, Jakarta.
- Suteki dan Galang Taufani, 2020, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Praktik)*, ed 1, cet 3, Rajawali Pers, Depok.
- Yudhi Setiawan, Boedi Djatmiko dan Imam Ropii, 2017, *Hukum Administrasi Pemerintahan: teori dan Praktik (dilengkapi dengan kasus pertanahan)*, Rajawali Pers, Depok.
- Zainuddin Ali, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/menlhk-setjen/2015 tentang Hutan Hak.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari

C. Skripsi/Tesis/Disertasi

Sartika, D, 2018, "Hukum Atas Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Batak Toba Di Desa Hutalontung, Kecamatan Muara," Skripsi Sarjana Universitas HKBP Nommensen, Medan.

D. Jurnal

Dharmawibawa, I. D, 2019, "*Kearifan lokal masyarakat Desa Seloto dalam pengelolaan sumberdaya alam di Danau Lebo*". Abdi Masyarakat, Vol.1, No.1, 2019.

Idris, Z., Apriani, D., & Erlina, E, 2019, "*Menuju Masyarakat Hukum Adat yang Legitimate dan Permasalahannya di Indonesia*", Jurnal Internasional, Vol. 3, 2019.

Salim, M, 2016, "*Adat Sebagai Wadah Perikat Untuk Mempertahankan Ikatan Persatuan Republik Indonesia*". Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, Vol. 3, No. 1, 2016.

Siddiq, N. K., & Assaori, M. S, 2021, "*Eksistensi Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dalam Pengelolaan Hutan*". Jurnal Fundamental Justice, Vol. 2, No. 1, 2021.

Sukanda Husin, 2014, "*Climate Change Mitigations on Forestry Base On REDD+ In International Law and Indonesia*", Jurnal Mimbar Hukum, Vol.13, No 3, 2014.

Thontowi, J, 2015, "*Pengaturan masyarakat hukum adat dan implementasi perlindungan hak-hak tradisionalnya*", Pandecta Research Law Journal, Vol. 10, No. 1, 2015.

Wiranti, N., & Suharso, P, 2016, “*Peran Paguyuban Masyarakat Ikan (PAMIK) Dalam Meningkatkan Pendapatan Anggota Di Dusun Rekesan Kecamatan Jambuwer Kabupaten Malang Tahun 2014*”, *Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi dan Ilmu Sosial*, Vol. 9, No. 1, 2016.

E. Internet

Duta Damai Sumatera Barat, “*Struktur Kemasyarakatan Masyarakat Minangkabau*”, <https://dutadamaisumaterabarat.id/struktur-kemasyarakatan-masyarakat-minangkabau/> dikunjungi pada 6 November 2023, Pukul 14:01 WIB.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, “*Akses Kelola Perhutanan Sosial*”, <http://pkps.menlhk.go.id/akps/web/index.php?r=site%2Ftentang#:~:text=Program%20Perhutanan%20Sosial%20sendiri%20bertujuan,pengelolaan%20area%20hutan%20kepada%20pemerintah> dikunjungi pada tanggal 4 Juni 2023, Pukul 19:34 WIB.

Tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pusat BPK, “*Wewenang dan Penyalahgunaan Wewenang dalam Hukum Administrasi Dikaitikan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014*”, <https://ntt.bpk.go.id/wp-content/uploads/2018/01/1.-tulisan-hukum-2017-penyalahgunaan-wewenang-release.pdf> dikunjungi pada 7 September 2023, Pukul 20:10 WIB.

Pemerintah Kota Padang, Dinas Komunikasi dan Informatika, “*Tentang Covid-19*”, [http://corona.padang.go.id/index.php/tentang-covid/tentang-covid19#:~:text=Apa%20Itu%20COVID%2D19,SARS%2DCoV%2D2\)](http://corona.padang.go.id/index.php/tentang-covid/tentang-covid19#:~:text=Apa%20Itu%20COVID%2D19,SARS%2DCoV%2D2)) dikunjungi pada 7 Januari 2024, Pukul 17:32 WIB.

Perkumpulan QBar, “*Menunggu Aksi Daerah Mengakui Hutan Adat*”, <https://perkumpulanqbar.org/blog/2019/04/11/menunggu-aksi-daerah-akui-hutan-adat/> dikunjungi pada 10 Oktober 2023, Pukul 19:57 WIB.

Realitakini.com, “*Sampaikan 10 Tuntutan, Perwakilan Masyarakat Malalo Tigo Jurai Berunjuk Rasa Di Tiga Lokasi*”, <https://www.realitakini.com/2022/08/sampaikan-10-tuntutan-perwakilan.html> dikunjungi pada 7 Januari 2024, Pukul 18:49 WIB.

F. Lain-lain

Masyarakat Hukum Adat Malalo Tigo Jurai dan Perkumpulan Qbar, “*Catatan Perjalanan Perjuangan Meraih Kedaulatan Wilayah Adat Malalo Tigo Jurai Tahun 2013-2023*”.

Masyarakat Hukum Adat Malalo Tigo Jurai, Tim Ulayat Malalo Tigo Jurai, Perkumpulan Qbar, Pemerintahan Nagari Guguak Malalo, Pemerintahan Nagari Padang Laweh Malalo, 2015, *“Hasil Riset Aksi Malalo Tigo Jurai”*.

Nasional, B. P. H, 2015, *“Draft Laporan Pengkajian Hukum tentang Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat”*.

Putusan Mahkamah Konstitusi 35/PUU-X/2012 tentang Penetapan Kawasan Hutan Adat.

Tim JDIH Pusat Badan Pemeriksa Keuangan, 2017, *“Wewenang dan Penyalahgunaan Wewenang dalam Hukum Administrasi Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014”*

W. Kurnia, Titin Fatimah, Rona Fitriati Hasanah, 2020, *“Kedudukan Hutan Adat Dan Hutan Nagari Sebagai Bagian Dari Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Sumatera Barat : Studi Harmonisasi Hukum Agraria dan Hukum Kehutanan”*, Penelitian Hibah Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas

